

## Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan

Ahmad Rosandi Sakir<sup>1</sup>, Yusriah Amaliah<sup>2</sup>, Juwita Pratiwi Lukman<sup>3</sup>, Marlina Rajab<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

<sup>4</sup>Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo, Kendari, Indonesia

e-mail: [ahmadrosandi8@gmail.com](mailto:ahmadrosandi8@gmail.com)<sup>1</sup>, [Yusriahamaliah@gmail.com](mailto:Yusriahamaliah@gmail.com)<sup>2</sup>, [Juwitapratiwilukman@gmail.com](mailto:Juwitapratiwilukman@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[Linarajab50@gmail.com](mailto:Linarajab50@gmail.com)<sup>4</sup>

Received : December, 2023

Accepted : December, 2023

Published : December, 2023

### Abstract

*The aim of this research is to gain an understanding of the strategies employed by the Department of Social Affairs in addressing street children in the city of Makassar, including the supporting and inhibiting factors influencing the implementation of these strategies. The research conducted is qualitative and descriptive in nature, utilizing sociological and communication approaches, with observation and interview techniques. Primary data sources include information obtained through direct observation at the research location and interviews, while secondary data is derived from documentation, mass media, and journals. The research findings indicate that the strategies of the Makassar City Social Affairs Department align with Regional Regulation No. 2 of 2008 related to the guidance of street children, homeless individuals, street musicians, and beggars. The department addresses these social issues through data collection activities and providing guidance. However, there are several obstacles in dealing with street children, such as the absence of facilities or rehabilitation centers in Makassar that can accommodate street children for personal development, aiming to reduce the number of street children in the area.*

*Keywords: Street Children, Handling, Strategies*

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai strategi yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di Kota Makassar, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan komunikasi, menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sumber data utama berasal dari informasi yang diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, media massa, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Sosial Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 yang berkaitan dengan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengamen, dan pengemis. Dinas Sosial mengatasi permasalahan sosial ini melalui kegiatan pendataan dan pemberian arahan. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam penanganan anak jalanan, seperti ketiadaan wadah atau panti rehabilitasi di Kota Makassar yang dapat menampung anak jalanan untuk pembinaan pribadi, dengan tujuan mengurangi jumlah anak jalanan di wilayah tersebut.*

*Kata Kunci: Anak Jalanan, Penanganan, Strategi*

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak menerima pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi serta peningkatan tingkat kecerdasan sesuai dengan minatnya. Hak ini bersifat universal dan mencakup semua anak, termasuk mereka yang hidup di jalanan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang mengesahkan Konvensi tentang Hak-hak Anak menjadi dasar hukum bagi hak-hak tersebut. (Wahyudi et al., 2021). Melalui dasar hukum ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak jalanan, serta memberikan dasar yang kuat untuk implementasi program-program pendidikan dan pengembangan pribadi bagi mereka. (Latipah et al., 2021).

Namun, meskipun kerangka hukum ini telah ada, tantangan dalam penanganan anak jalanan tetap ada. Anak jalanan seringkali berhadapan dengan berbagai masalah, termasuk kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan, perlindungan sosial, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, perlu strategi dan implementasi kebijakan yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak anak jalanan benar-benar terlindungi dan mereka memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan. (Ibnu Santoso et al., 2022).

Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga terkait dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut mencakup pembangunan program pendidikan yang inklusif, pembentukan lingkungan sosial yang mendukung bagi anak jalanan, serta upaya untuk memperkuat jejaring sosial dan perlindungan bagi mereka. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi anak jalanan. Anak jalanan, yang umumnya berada pada usia yang dianggap produktif dan usia sekolah, seharusnya memiliki peluang

pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Meskipun demikian, mereka juga dihadapkan pada keterbatasan, terutama dalam hal menjalani kehidupan sehari-hari dengan mencari nafkah di jalanan (Abdullah, 2021). Meskipun demikian, sebagai warga negara, anak jalanan memiliki hak untuk menerima layanan pendidikan. Dalam konteks ini, tantangan terletak pada bagaimana memberikan pendidikan yang memenuhi kebutuhan mereka, sambil memahami dan mengatasi realitas kehidupan mereka yang unik. (Salidyn et al., 2020).

Kota Makassar, sebagai salah satu pusat perkembangan di Indonesia, tidak terlepas dari kompleksitas masalah sosial, salah satunya adalah keberadaan anak jalanan. Anak-anak yang hidup di jalanan seringkali menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat Makassar untuk bersatu dalam upaya pembinaan anak jalanan, agar mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

Pemerintah Kota Makassar, terutama melalui Dinas Sosial Kota Makassar, memiliki tanggung jawab besar dalam upaya penanggulangan dan penanganan masalah anak jalanan. Dinas Sosial Kota Makassar memegang peran sentral dalam menghadapi tantangan ini dan berkomitmen untuk mengatasi permasalahan anak jalanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek penanganan langsung terhadap anak jalanan, tetapi juga melibatkan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan sepenuhnya oleh Negara. (Ali et al., 2021).

Dalam melaksanakan visi dan misi Dinas Sosial Kota Makassar, langkah-langkah proaktif dan inovatif harus diambil untuk menghadapi permasalahan anak jalanan. Ini melibatkan pelaksanaan program-program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial. Selain itu, Dinas Sosial perlu mengembangkan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial (Pratama Afjan & Hayat, 2023). Dengan pendekatan yang komprehensif dan

berkelanjutan, Dinas Sosial Kota Makassar dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anak jalanan. Visi dan misi Dinas Sosial Kota Makassar menekankan tercapainya pengendalian terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Langkah ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial. Dinas Sosial berkomitmen pula untuk mengembangkan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel bagi mereka yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial, sekaligus meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam menangani isu-isu kesejahteraan sosial. (Rachmawati & Faedlulloh, 2021).

Berbagai program yang terkait dengan anak jalanan, yang dikelola oleh bidang Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Mengikutsertakan dalam pengembangan fasilitas untuk menampung anak jalanan, memberikan pelatihan keterampilan, dan menyediakan praktik belajar kerja bagi mereka, namun demikian, Dinas Sosial Kota Makassar masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya menangani masalah anak jalanan. Salah satu contohnya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi banyak anak jalanan atau ketidaksetujuan mereka untuk dilibatkan dalam program pembinaan, karena mereka telah terbiasa hidup bebas dan menolak aturan yang diterapkan di Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (RSPA). (Popo et al., 2022)

Kota Makassar, sebagai gerbang utama Kawasan Timur (KTI) dan salah satu dari lima kota besar di Indonesia, saat ini dihadapkan pada status sebagai "Kota Anak Ramah".

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, sebuah metode yang sangat relevan untuk menggali lebih dalam beberapa fenomena terkait penanganan anak jalanan di Kota Makassar. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, digunakan untuk memastikan akurasi informasi yang terkait dengan objek penelitian.

Namun, paradoksnya, fenomena anak jalanan terus meningkat, menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah Kota Makassar, terutama Dinas Sosial yang memiliki peran krusial dalam mengatasi isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami masalah anak jalanan yang merupakan sebuah tantangan di tengah status "Kota Anak Ramah" yang diembannya.

Anak jalanan, berusia 4 hingga 16 tahun, muncul sebagai dampak dari sejumlah masalah, seperti turunannya dari masalah ekonomi, kemiskinan, pendidikan, tempat tinggal, hubungan keluarga, kebutuhan makanan, kesehatan, risiko pekerjaan, serta penyalahgunaan obat terlarang dan zat adiktif lainnya. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat masyarakat miskin semakin terpinggir dan terjepit, mendorong mereka mencari solusi dengan mengorbankan anak-anak mereka untuk mencari penghasilan di jalanan, misalnya dengan mengemis, mengamen, menjual koran, tisu, atau melakukan aktivitas lain yang melibatkan anak di jalanan. (Wahyudin & Jamil, 2021).

Penelitian ini diadakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena anak jalanan di Kota Makassar dan menyoroti perlunya respons yang tegas dari pemerintah, terutama Dinas Sosial. Langkah-langkah konkret, seperti memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, perlu diambil sebagai upaya untuk memberikan pondasi investasi sumber daya manusia yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek kritis dari masalah anak jalanan dan menyoroti urgensi tindakan pemerintah dalam menangani isu sosial ini.

Lokasi penelitian berada di wilayah Kota Makassar, di mana peneliti melakukan wawancara dengan 11 informan yang dipilih secara sengaja (purposive sampling) berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan informasi terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merinci dan memahami dengan lebih mendalam aspek-aspek tertentu

dalam penanganan anak jalanan di konteks kota tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu anak jalanan bukanlah hal baru, sebab pemerintah telah mengalokasikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Meskipun Kota Makassar mengalami kemajuan pesat dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan pusat perbelanjaan, namun keberadaan anak jalanan tetap menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kondisi ekonomi keluarga mereka, mendorong anak-anak tersebut untuk terlibat dalam pekerjaan yang bukanlah pilihan profesi mereka, seperti mengemis di lampu merah atau menjual koran.

Sosialisasi merupakan aspek yang krusial dalam menangani permasalahan ini. Pihak yang bertanggung jawab perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi harian terkait aturan-aturan yang ditetapkan untuk menertibkan masyarakat dan anak jalanan. Namun, implementasi sosialisasi ini belum berjalan dengan baik, sehingga masih terdapat anak jalanan yang berada di titik-titik tertentu, menjadi hambatan bagi perkembangan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui kegiatan kampanye dan sosialisasi, mereka berupaya menyampaikan aturan dan larangan kepada masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya. Meskipun demikian, diperlukan evaluasi dan strategi yang lebih efektif guna mengatasi tantangan yang masih dihadapi dalam menangani isu anak jalanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait peraturan yang diterapkan. (Sakir & Pattimura, 2022)

Setelah melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan melalui kegiatan patroli, Dinas Sosial Kota Makassar mengadakan kampanye dan sosialisasi terkait Peraturan Nomor 2 Tahun 2008 sebagai alat pengikat. Selain itu, mereka berupaya menyebarkan informasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan. Kegiatan kampanye ini melibatkan berbagai elemen seperti pertunjukan, orasi,

pemasangan spanduk, dan baliho untuk menekankan larangan memberikan uang pada anak jalanan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, dan secara langsung melalui ceramah serta interaksi dengan masyarakat atau anak jalanan.

Upaya juga dilakukan oleh Satpol-PP untuk mengatasi anak jalanan yang masih berada di titik-titik tertentu. Mereka menangkap anak jalanan dan membawanya ke kantor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Tanggung jawab Dinas Sosial Kota Makassar dalam menjaga dan melindungi masyarakat, khususnya anak jalanan yang terpaksa berada di jalanan karena desakan ekonomi keluarga, menjadi sangat penting.

Realitas sosialisasi saat ini tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat di Kota Makassar. Keberadaan anak jalanan menjadi permasalahan klasik yang terus dihadapi oleh pemerintah, menjadi tantangan serius dalam upaya mengurangi jumlah mereka. Dalam konteks ini, perlunya penyesuaian strategi sosialisasi untuk lebih efektif menangani kompleksitas masalah anak jalanan yang telah menjadi aspek signifikan dalam dinamika sosial kota tersebut. Dinas Sosial Kota Makassar, sebagai lembaga yang memegang tanggung jawab penanganan anak jalanan, telah melakukan berbagai upaya dalam menangani fenomena sosial ini, yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Seperti yang disampaikan oleh (S et al., 2021), strategi diartikan sebagai seni yang melibatkan kemampuan intelektual untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan dengan keuntungan maksimal dan efisien. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya persiapan sumber daya, terutama sumber daya manusia, dalam mencapai tujuan, khususnya dalam strategi penanganan fenomena sosial di kota besar seperti Makassar.

Dibawah ini akan dijelaskan Peran dan Strategi Dinas Sosial Kota Makassar dalam penanganan anak jalanan:

#### 1. Kesamaan Visi dan Misi dengan Keadaan Masyarakat

Visi dan misi Dinas Sosial sejatinya sudah memiliki arah yang jelas dalam membentuk kehidupan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal, menyebabkan masyarakat merasa terkekang dan kesulitan

mencapai kebebasan serta kemajuan dalam kehidupan mereka. Hal ini terutama dirasakan oleh anak-anak yang mencari rezeki di sudut-sudut Kota Makassar, menciptakan gejala sosial yang tidak dapat diatasi hanya melalui program bantuan langsung tunai.

Kondisi masyarakat yang menghadapi feminitas, terutama kelompok yang tertindas, memerlukan inovasi dan upaya yang signifikan dari pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sudah lama mengakar dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat, terutama dalam hal ekonomi yang lemah. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya sedang berada pada usia produktif, terpaksa melakukan aktivitas di bawah lampu lalu lintas di berbagai sudut Kota Makassar.

Diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan terarah untuk mengimplementasikan visi dan misi Dinas Sosial. Inovasi dalam bentuk program yang lebih holistik dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan dampak positif pada anak-anak yang terpinggirkan. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari program pemerintah, terutama dalam menciptakan kondisi yang lebih baik untuk anak-anak di Kota Makassar.

Pentingnya peran pemerintah dalam menangani masalah sosial, terutama terkait ekonomi masyarakat yang rentan, menjadi sorotan yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Langkah-langkah strategis dan terkoordinasi harus diambil untuk memastikan efektivitas upaya penanganan anak jalanan dan permasalahan sosial lainnya di tengah masyarakat. Dengan demikian, visi dan misi Dinas Sosial dapat menjadi landasan kuat untuk transformasi positif dalam memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, terutama anak-anak yang merupakan aset masa depan.

## **2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Penanganan masalah anak jalanan membutuhkan inovasi dan terobosan baru untuk mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi saat ini. Kendalanya terletak pada ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, yang menjadi faktor kritis untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan proses penanganan. Aspek sumber daya

manusia menjadi pondasi utama untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan program penanganan yang optimal. Oleh karena itu, Dinas Sosial memiliki peluang besar untuk mengatasi permasalahan anak jalanan dengan memberikan arahan dan bimbingan secara langsung.

Pentingnya terobosan dan inovasi dalam penanganan anak jalanan membawa perhatian khusus pada aspek-aspek sumber daya manusia, seperti kompetensi, motivasi, loyalitas, dan disiplin kerja. Dengan memperhatikan elemen-elemen ini, penanganan terhadap anak jalanan dapat diarahkan sesuai harapan, memberikan dampak positif dan solusi yang lebih efektif. Namun, realitas lapangan belum selaras dengan harapan, mengakibatkan ketertinggalan dalam membangun kesadaran berfikir, keilmuan, dan Ilmu Penegetahuan

Anak jalanan, pada kenyataannya, juga sangat menginginkan pelayanan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, upaya penanganan perlu mengintegrasikan aspek pendidikan yang berfokus pada memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk anak jalanan. Dengan begitu, tidak hanya kesenjangan sosial yang dapat diatasi, tetapi juga memberikan peluang nyata bagi perkembangan positif anak-anak jalanan dalam segi pengetahuan dan keterampilan.

## **3. Partisipasi Masyarakat**

Dinas Sosial aktif melakukan kegiatan penanganan anak jalanan dengan fokus utama mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upaya tersebut. Kesenjangan yang dialami anak jalanan menjadi hasil dari serangkaian kegiatan, seperti pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan patroli di titik-titik atau tempat umum yang dikenal sebagai lokasi seringnya anak jalanan berkumpul. Setiap hari, patroli rutin diadakan untuk memantau keberadaan anak jalanan, pengamen, gelandangan, dan pengemis. Meskipun upaya ini dilakukan secara konsisten, masih terdapat anak jalanan yang terus melanjutkan aktivitas mereka. Oleh karena itu, aparat seperti Satpol PP dan Polrestabes turun langsung untuk segera menangkap mereka yang tertangkap basah, terutama di sekitar area lampu merah.

Dalam tindak lanjut, Dinas Sosial melakukan penelusuran di jalan-jalan Kota Makassar berdasarkan hasil patroli. Informasi ini kemudian dikonfirmasi melalui proses pendataan dan arsip yang ada di Dinas Sosial, untuk memastikan keberadaan anak jalanan di lokasi yang telah diidentifikasi. Melalui langkah ini, tergambar kedisiplinan masyarakat dalam menghadapi tantangan anak jalanan, dengan pendirian panti rehabilitasi atau rumah perlindungan sosial anak. Inisiatif ini berasal dari masyarakat sendiri dan dikelola secara swadaya.

Selain kegiatan patroli, langkah-langkah seperti pendataan dan penegakan aturan oleh aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari strategi Dinas Sosial. Adanya panti rehabilitasi atau rumah perlindungan sosial anak yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan solusi untuk anak jalanan. Dengan demikian, melibatkan partisipasi masyarakat dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan anak jalanan di Kota Makassar.

Penting bagi Pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar untuk menjalin hubungan kerja sama yang kuat dengan masyarakat guna mengatasi permasalahan anak jalanan secara efektif. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi pilar utama yang mendukung upaya bersama dengan pemerintah Dinas Sosial dalam menangani masalah ketidaksetaraan ekonomi yang dialami anak jalanan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan sinergi yang diperlukan untuk memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap tantangan ini.

Dengan memperkuat kerja sama ini, Pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar dapat memanfaatkan pengetahuan lokal dan keterlibatan aktif masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program-program penanganan anak jalanan. Melibatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam menyusun solusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, permasalahan anak jalanan dapat diatasi secara lebih holistik dan berkesinambungan melalui upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat setempat.

#### **4. Sosialisasi**

Dalam konteks sosialisasi, penting bagi pihak yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efektivitasnya dengan melakukan sosialisasi secara rutin dan konsisten setiap hari. Sosialisasi ini harus fokus pada aturan-aturan yang diperlukan untuk menertibkan anak jalanan dan menciptakan kesadaran di antara masyarakat. Sayangnya, kondisi ini tidak selalu dijalankan dengan baik, yang menyebabkan anak jalanan masih terlihat berada di titik-titik tertentu tanpa adanya perubahan yang signifikan.

Dinas Sosial, sebagai lembaga yang memegang tugas dan tanggung jawab, perlu mengintensifkan kegiatan seperti kampanye dan sosialisasi. Melalui kampanye ini, mereka dapat menyampaikan informasi terkait peraturan nomor 2 tahun 2008 yang menjadi landasan hukum dan memberikan informasi tentang larangan memberikan uang kepada anak jalanan. Upaya ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat di Kota Makassar terhadap peraturan yang ada dan memberikan dukungan aktif dalam menangani permasalahan anak jalanan. Dengan demikian, upaya sosialisasi yang lebih intensif dapat menjadi kunci untuk mencapai perubahan positif dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar.

Kegiatan kampanye dalam menangani anak jalanan melibatkan berbagai metode, seperti pertunjukan, orasi, pemasangan spanduk, dan baliho dengan pesan yang menekankan untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan. Penyebaran informasi dilakukan melalui beragam media, mencakup tulisan dan penyampaian secara langsung melalui ceramah. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengurangi atau mencegah keberadaan anak jalanan di lokasi-lokasi tertentu.

Dalam penanganan anak jalanan, Satpol PP memiliki peran yang signifikan. Mereka melakukan penangkapan terhadap anak jalanan yang masih berada di lokasi tertentu, selanjutnya membawa mereka ke kantor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah diterbitkan. Peran serta Satpol PP dalam menjalankan proses penanganan anak jalanan dapat dianggap sebagai upaya yang memberikan arah yang baik.

Satpol PP menjelaskan dan mensosialisasikan larangan-larangan serta sanksi-sanksi yang tercantum dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008. Melalui pendekatan ini, perubahan dalam jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun diharapkan dapat teratasi. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan, melibatkan berbagai metode untuk mencapai dampak yang positif dalam jangka panjang.

#### 5. Pembinaan

pembinaan anak jalanan di Kota Makassar harus dimulai dengan pemahaman mendalam tentang akar permasalahan. Diperlukan penelitian dan analisis yang menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab utama anak-anak terjerumus ke jalanan. Dengan pemahaman yang baik, program pembinaan dapat dirancang secara tepat sasaran untuk memberikan solusi yang efektif.

Pendidikan adalah kunci untuk memberikan harapan dan peluang kepada anak jalanan. Diperlukan upaya intensif dalam memastikan bahwa setiap anak jalanan di Kota Makassar memiliki akses ke pendidikan yang layak. Program pendidikan non-formal dan penyediaan sarana belajar yang mudah diakses di tempat-tempat yang sering dihuni oleh anak jalanan dapat menjadi langkah awal yang efektif.

Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan langkah krusial dalam membina anak jalanan. Dengan melibatkan komunitas sekitar, tercipta lingkungan yang mendukung untuk reintegrasi anak jalanan ke dalam masyarakat. Program pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, dan dukungan sosial dapat membantu anak-anak tersebut merasa diterima dan memiliki peran yang positif dalam lingkungan mereka.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil analisis mengenai strategi Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar menunjukkan bahwa implementasi strategi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dinas Sosial masih menghadapi

kendala dalam menerapkan inovasi atau strategi baru yang dapat memastikan penanganan anak jalanan secara efektif dan kondusif. Penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial saat ini terbatas pada kegiatan patroli, esesmen, pembinaan, pendataan, dan pemberian arahan, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum mencapai optimalitas dalam menangani permasalahan sosial anak jalanan.

Sebagai solusi, disarankan untuk segera mendirikan panti rehabilitasi di Kota Makassar agar penanganan anak jalanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu, perlu diperkuat sanksi yang diberikan kepada anak jalanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas strategi Dinas Sosial dan memberikan dampak positif yang lebih nyata terhadap penanganan anak jalanan di Kota Makassar.

#### 6. PERNYATAAN PENGHARGAAN

Ucapan Terima Kasih Penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Makassar yang sudah bersedia menjadi Informan dalam Penelitian ini, dan Juga kepada Informan pendukung yang bersedia untuk kami wawancarai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, Y. A. (2021). Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anakjalanan Di Kota Samarinda. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 9(1), 78–91. [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal\\_Yanuar\\_\(02-14-21-10-34-11\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal_Yanuar_(02-14-21-10-34-11).pdf)
- [2] Ali, M., Muhammadiyah, & Abdi. (2021). Strategi Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(5), 1663–1676. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- [3] Ibnu Santoso, B., Yulyana, E., & Lina Aryani. (2022). MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PERMASALAHAN TUNA SOSIAL DI KOTA BEKASI (Studi pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak

- Jalanan). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 213–223. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2699>
- [4] Latipah, S., Meigawati, D., & Mulyadi, A. (2021). Kinerja Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(75–84).
- [5] Popo, C. D., Singkoh, F., Kinerja, K. K., Sosial, D., & Jalanan, A. (2022). 2(1), 1–12.
- [6] Pratama Afjan, W. Y., & Hayat, H. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang). *Journal Publicuho*, 6(2), 549–559. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156>
- [7] Rachmawati, V., & Faedulloh, D. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. *Journal of Political Issues*, 2(2), 67–78. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38>
- [8] S, K., Yolanda, D., & Maraliza, H. (2021). Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>
- [9] Sakir, A. R., & Pattimura, U. (2022). *TENGAH EMPOWERMENT OF THE POOR BY THE SOSIAL WELFARE OFFICE IN LETWARU VILLAGE, MASOHI DISTRICT, CENTRAL MALUKU* Salah satu kewajiban Pemerintah yakni melakukakn penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan sebagai pemenuhan atau wujud dari amanat raky. 3(1), 1–10.
- [10] Salidyn, M., Kadir, H. A., & Wahba, W. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Penanganan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Palu. *Jurnal Sinar Manajemen*, 7(2), 95–104. <https://doi.org/10.56338/jsm.v7i2.1229>
- [11] Wahyudi, A., Usman, J., & Mone, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Journal.Unismuh*, 2(4), 1287–1299. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- [12] Wahyudin, M., & Jamil, M. J. (2021). Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15757>